

**INFORMASI PRODUK : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAT ARI ANSYAH
C 100 140 326**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**INFORMASI PRODUK : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAT ARI ANSYAH

C 100 140 326

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIK.

HALAMAN PENGESAHAN

**INFORMASI PRODUK : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta**

OLEH:

**MUHAMMAT ARI ANSYAH
C 100 140 326**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 Maret 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji,

1. Dr. Kelik Wardiyono, S.H.,M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H.,M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,PhD. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Maret 2019

Penulis



MUHAMMAT ARI ANSYAH
C 100 140 326

INFORMASI PRODUK : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta

Abstrak

Pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Tujuan Perlindungan Konsumen adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah profil informasi yang diperoleh konsumen pedagang kaki lima di Surakarta? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi yang diperoleh konsumen pedagang kaki lima di Surakarta?. Metode yang digunakan pada penelitian adalah Normatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen pedagang kaki lima di Surakarta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pedagang Kaki Lima.

Abstrack

Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. Consumers are every person who uses goods and / or services available in the community, both for the sake of themselves, family, other people and other living creatures and is not traded. Street vendors (PKL) are business actors that conduct trade business using mobile or immovable business facilities, using municipal infrastructure, social facilities, public facilities, land and buildings belonging to the government and / or the private sector that are temporary / non-permanent. The aim of Consumer Protection is to foster awareness of business actors regarding the importance of consumer protection so that an honest and responsible attitude in the business grows. The formulation of the problem is (1) What is the profile of the information obtained by the consumers of street vendors in Surakarta? (2) How is the legal protection for consumers of information obtained by consumers of street vendors in Surakarta? The method used in the study is Normative. The results of this study are legal protection for street vendors in Surakarta.

Keywords: Legal protection, Consumer, Street Vendor Protection

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan pada daerah Surakarta sudah berkembang dengan pesat dimana pedagang kaki lima berada hampir sebagian kota. Saat ini sangat mudah ditemui para penjual makanan dan minuman yang ada dilingkungan sekitar tempat umum dan tempat tinggal, yang menjadi masalah saat ini para pelaku usaha belum mengerti bagaimana cara memproduksi makanan dan minuman yang benar. Menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Pada ayat 3 yang berbunyi, “ pelaku usaha adalah

setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan menurut PP nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima berbunyi “pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Menurut Siahaan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum konsumen dimaksudkan hukum perdata dalam arti luas termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah – kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai perundang – undangan lainnya. Baik hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Kaidah – kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam KUH Perdata. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung “menganggap” KUH Perdata (BW) tidak sebagai Undang – Undang tetapi sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Hak – hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak – hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam UUPK No 8 Tahun 1999. Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

1. Perlindungan Konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamananya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersaebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Ketidak perdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas merugikan kepentingan masyarakat. Biasanya pelaku usaha berlandung pada berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Banyak penyimpangan – penyimpangan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, dimana pelaku usaha tersebut tidak mengikuti peraturan dari undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang – undang lainnya yang menyakut atas konsumen. Pada pelaku usaha beritikad tidak baik terhadap konsumen dimana menu, harga, bahan masakan yang terkandungnya, dan sebagainya yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha pedagang kaki lima. Konsumen yang kurang kritis atas perlakuan pelaku usaha tersebut hanya diam dan biasanya dalam harga yang tidak tercantum dalam menu maka pelaku usaha biasanya meninggikan harga yang melebihi standar penjualan makanan maupun minuman. Sistem peradilan yang dinilai rumit, cenderung bertele – tele dan relatif mahal turut mengaburkan hak – hak konsumen dan kewajiban – kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang menjadi hak – hak dan kewajiban – kewajibannya terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan hukum.

Pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha antara lain tanggal kadaluwarsa yang teleah lewat, kemasan atau isi yang rusak, tidak adanya pencantuman izin dari Depkes sebagai bukti produk tersebut aman dikonsumsi. Dalam penegolahannya masih menggunakan bahan – bahan yang berbahaya dikonsumsi sehingga mengancam kesehatan konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Pelaku usaha akan tetapi dalam mengelolah makanan tersebut hanya memperhatikan keuntungan financial saja tanpa memperhatikan kemurnian dan resiko dari kandungan makanan tersebut. Dan bisanya pelaku usaha mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas dan jujur lewat label pagan, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

2. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Normatif. Pendekatan Normatif dimana merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan primer atau bahan sekunder dan data-data pendukung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deduktif berupa kata – kata tertulis atau lisan, gambar, menu, dan spanduk yang terdapat dipedagang kaki lima dibandingkan dengan sebuah norma konsep hukum yang terdapat dalam undang – undang mengenai konsumen. Tujuan untuk memberikan seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan konsumen. Jenis data yang diperoleh atau yang digunakan untuk penelitian ini bersifat primer dan sekunder, data primer adalah spanduk iklan, daftar menu pedagang kaki lima dan data sekunder

yang terdiri dari sumber-sumber data yang telah digunakan sebagai referensi atau sebagai pendukung dalam penelitian, seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Informasi Yang di Peroleh Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

3.1.1 Label Dalam Daftar Menu Pedagang Kaki Lima

Pelaku usaha yang ingin memproduksi suatu makanan maupun minuman untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label dalam kemasan atau daftar menu yang akan ditunjukkan terhadap konsumen. Label tersebut berisikan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 3 ayat 2 Sub D berbunyi : nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Sekurang – kurangnya harus mencantumkan nama dan alamat suatu yang diproduksi oleh pedagang kaki lima di dalam daftar menunya. Pada hasil penelitian ini terdapat banyak sekali tidak melengkapi dalam penglabelannya dimana sekurang – kurangnya harus terdapat nama dan alamat yang ada didaftar menu sebuah makanan atau minuman yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima. Beberapa pedagang kaki lima disurakarta yang sudah benar atas melengkapi labelnya seperti sentral rasa seafood, pak min warung sate solo, dan warung soto ayam. Pedagang kaki lima tidak benar dalam pelabelannya terdapat hanya nama warungnya saja tanpa diberikan alamat yang jelas seperti sate ayam ponorogo, balane rika nasi goreng, mix kebab, mie ayam, roti johns Surabaya, sempol ayam ngehe, de'ranch jagung bakar, mister burger, mas yudi susu segar, kolin, capcuzz, dan fremilt. Terdapat banyak sekali yang tidak melengkapi atas penelitian yang dilakukan dilapangan.

3.1.2 Kehalalan Makanan dan Minuman dalam Daftar Menu Pedagang Kaki Lima

Indikator kehalalan makanan dan minuman pedagang kaki lima pada hasil penelitian yang sudah dilakukan ialah Menurut Undang – Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 2 berbunyi “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.” Adapun yang dimaksud dengan Produk Halal menurut menurut Burhanuddin adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Mengenai pelabelan halal, pedagang kaki lima wajib mencantumkan label halal didalam dan/atau pada kemasan pangan. Bahwa pedagang kaki lima yang membuat daftar menu untuk mengetahui apa saja yang diperdagangkan masih banyak tidak mencantumkan label halal pada daftar menunya. Beberapa pedagang kaki lima yang mencantumkan label halal didalam daftar menunya ialah sempol ayam ngehe dan mister burger. Pada pedagang kaki lima lainnya banyak

sekali tidak mencantumkan halal didalam daftar menunya seperti pedagang makanan yaitu central rasa seafood, balane rika nasi goreng, mix kebab, pak min warung sate, roti johns Surabaya, warung soto ayam, de'ranch jagung bakar, dan pedagang minuman yaitu mas yudi susu segar, kolin original, capcuzz, fremilt. Pada penelitian tersebut yang tidak melebelkan halalnya suatu makanan dan minuman kita tidak bisa mengetahui apakah makanan atau minuman tersebut dapat dikonsumsi bagi muslim ataupun dari bahan – bahan yang diharamkan.

3.1.3 Harga Pada Daftar Menu Pedagang Kaki Lima

Indikator pada harga pada daftar menu pedagang kaki lima yaitu kewajiban pada pedagang kaki lima untuk mencantumkan harga pada daftar menu merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, dasar hukum lain yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan pelaksanaannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI”). Pada intinya kedua aturan tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. Khusus soal daftar harga pada pedagang, Romawi II huruf A SE BI tersebut mengatur: “Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan.” Kewajiban dan larangan di atas antara lain berlaku untuk daftar harga, seperti daftar harga menu restoran. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sudah banyak sekali pedagang kaki lima mencantumkan harga pada daftar menunya dan mengetahui kewajiban dan pentingnya pencantuman harga dalam daftar menu. Pedagang kaki lima disurakarta masih terdapat beberapa yang tidak mencantumkan harga pada daftar menunya ialah warung soto ayam pada penelitian yang dilakukan atas pedagang kaki lima disurakarta. Pentingnya akan pencantuman harga tersebut akan tidak menimbulkan penipuan harga yang dapat merugikan konsumen.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Yang di Peroleh Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

Perlindungan hukum bagi konsumen diatas konsumen yang merasa dirugikan atas dilakukan oleh pedagang kaki lima, dapat melaporkan perbuatan tersebut atas informasi yang tidak benar. Pada kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Daftar menu yang diberikan oleh pedagang kaki lima yang tidak lengkap atas nama, alamat, halal dan harga yang seharusnya tertera dalam daftar menunya. Biasanya yang tidak melengkapi informasi didalam daftar menu terjadi kecurangan yang akan ditimbulkan seperi bila tidak memiliki alamat yang lengkap

susah akan mencarinya, kehalaln makanan yang tidak ada bagi kaum muslim takut akan membelinya dan harga yang tidak dicantumkan kerap akan penipuan harga yang ditinggikan dari pada mkanan dan minuman yang sejenis. Penyelesaian yang dilakukan biasanya berujung damai antara pedagang kaki lima dan konsumen. Pada setiap tahap diusahakan untuk penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Karena pada biaya yang dilakukan dalam penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang akan digugat. Apabila konsumen yang dirugikan masih ingin melanjutkan untuk pertanggung jawaban dari pedagang kaki lima bisa melanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalu BPSK dan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban pedagang kaki lima dapat diiklasifikan menjadi beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi negara, sesuai dengan jenis pelanggaran dan pasal – pasal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

3.2.1 Pertanggungjawaban Perdata

Kewajiban antara pedagang kaki lima dan konsumen dalam kegiatan perdagangan untuk bertanggung jawab secara perdata dapat muncul didasarkan pertanggung jawaban kontraktual maupun berdasarkan pertanggungjawaban produk, serta pertanggungjawaban professional.

3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Menimbulkan efek jera bagi para pedagang kaki lima atas informasi yang diberikan tidak sesuai atau jujur, maka dimungkinkan untuk mengenakan sanksi pidana. Peluang untuk pengenaan sanksi pidanan terhadap pelanggaran ketentuan pedagang kaki lima atas informasi yang diberikan, berdasarkan ketentuan UUPK pasal 62 ayat 1 berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3.2.3 Pertanggungjawaban Administrasi Negara

Dalam rangka pertanggungjawaban secara administrasi negara, pemahaman masyarakat pada umumnya tertuju kepada sanksi – sanksi berupa penghentian kegiatan untuk sementara, pencabutan izin usaha dan sebagainya. Pengenaan sanksi administrasi dapat ditemukan pada berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Yang Diperoleh Konsumen Pedagang Kaki Lima Dari Perspektif Hukum Islam.

Keadilan pada hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar maka terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Pada etika islam di bidang dagang apabila dilanggar atas kewajibannya, akibatnya harus dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya berpengaruh kepada konsumen dan pedagang kaki lima namun juga keterlibatan sosial masyarakat dan agama. Pada kecurangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beliau bersabda *“Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas, agar orang yang akan membeli dapat melihatnya? Barangsiapa berbuat curang kepada kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami”* Hadist Riwayat Muslim.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Profil Informasi yang seharusnya di dapat oleh konsumen terhadap daftar menu yang diberikan pedagang kaki lima memuat tentang label yang sekurang – kurangnya (1) nama warung (2) alamat warung tersebut menurut PP nomor 69 tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 3 ayat 2 Sub D, halal yang tertera di daftar menu menurut Undang – Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 2, dan harga yang harus tertera didalam daftar menu pedagang kaki lima yang terdapat di Surakarta menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”). Dalam daftar menu pedagang kaki lima tersebut masih belum memenuhi beberapa ketentuan peraturan terhadap informasi yang benar, jelas dan jujur menurut Undang – Undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengakibatkan informasi yang tidak benar , jelas dan jujur oleh pelaku usaha menimbulkan banyak penipuan yang akan terjadi bila tidak melengkapi apa yang diharuskan tertera pada daftar menu makanan maupun minuman pedagang kaki lima di Surakarta.

4.2 Saran

Pertama kepada pemerintah yang mengawasi akan pedagang kaki lima terhadap perbuatan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku harus bertindak dikarenakan banyaknya konsumen yang masih dirugikan oleh pelaku usaha atau pedagang.

Kedua kepada pedagang kaki lima demi menghemat biaya produksi jangan melupakan apa yang menjadi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur dengan membuat daftar menu yang tidak lengkap.

Ketiga kepada konsumen harus lebih teliti akan memilih pedagang dan mempelajari dan mendalami atas hak dan kewajiban konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Gunawan, Johanes, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- SEMA RI Tanggal 5 September 1963 Tentang Gagasan Menganggap BW tidak sesuai Undang – undang dalam Az.Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.